Pemerintah Kabupaten Paser





RENCANA KERJA

TAHUN 2025

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

bpbdkabpaser@gmail.com

Rancangan Akhir Renja
Tahun 2025

BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub. Kegiatan.

Rancangan Ahkhir Rencana Kerja (Ranhir) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser merupakan Rencana Kerja periode satu tahunan yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser untuk tahun berikutnya, dimana dalam Renja Perangkat Daerah menggambarkan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk masa satu tahun kedepan yang merupakan bagian dari Rencana Kerja lima tahun kedepan yang terdapat dalam Renstra tahun 2021-2026.

Dalam Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah akan menganalisa setiap tujuan dan sasaran yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan sesuai tupoksi yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Demikian Rancnagan Rencana Akhir Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 dibuat dan kami berharap agar Rencana Kerja (Renja) ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025.

Tana Paser, 10 Juli 2024

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Paser

Ruslan, S.Sos, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19681025 199303 1 005

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1-2
1.2 Landasan Hukum..... 3
1.3 Maksud Dan Tujuan..... 5
1.4 Sistematika Penyusunan..... 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU..... 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... 7
Tabel T-C. 29..... 8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 14
Tabel T-C. 30..... 15
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi..... 18
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 19
Tabel T-C. 31..... 20
2.5 Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 27
Tabel T-C. 32..... 27

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 28

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 28
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... 28
3.3 Program dan Kegiatan..... 29
Tabel T-C. 33..... 30

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.. 38

BAB V PENUTUP..... 41

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Paser. Berdasarkan diktum kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mengamanatkan kepada daerah yang telah menetapkan Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah untuk segera melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

Dan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026. Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2021-2026, sehingga terdapat konsistensi antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran sebagai bagian dari evaluasi audit kinerja yang mulai dilaksanakan Tahun 2025.

Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan bagian dari dokumen Perencanaan yang berisi rencana kerja program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun kedepan. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, RKPD memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, serta program-program dan kegiatan pembangunan yang terukur disertai pagu indikatif dan pendanaannya. Rencana Kerja Pembangunan Daerah mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja Perangkat Daerah akan menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra) ke dalam rencana program dan penganggaran tahunan. Dengan demikian Renja merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Seperti yang tertuang dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004, mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra PD dan mengacu kepada RKPD.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Paser, yang mana telah tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026. Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah :

"TERWUJUDNYA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG TERDAMPAK BENCANA "

Untuk mewujudkan Visi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menetapkan misi dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi organisasi. Adapun Misi yang diemban antara lain :

a. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang handal dan tangguh dalam menghadapi Pra bencana, Tanggap darurat dan Pascabencana.
b. Memaksimalkan keterlibatan semua stakeholder dalam penyelenggaraan bencana.
c. Mewujudkan pelayanan penanganan kedaruratan yang lebih baik dan cepat kepada masyarakat yang terdampak bencana dengan peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan sistem logistik dan peralatan.
d. Mewujudkan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana dan berkoordinasi dengan instansi terkait .

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 akan mengarah pada pencapaian sasaran pembangunan yang di dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan baik dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ada beberapa landasan hukum yang digunakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rancana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 yang merubah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat DaerahPeraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Mendagri Nomor 86 Tahun 2017 tata cara perencanaan, pengendalian danevaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan

rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Akhir Kerja (RENJA) Tahun 2025 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu satu tahun kedepan guna tercapainya efektifitas dan efisiensi sumber daya yang dimiliki dan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, pengganggaran, pelaksanaan program kegiatan dan Sub. Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta pemenuhan SPM .

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah :

a. Terwujudnya dokumen Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menjadi acuan kegiatan dan Sub. Kegiatan.
b. Terciptanya kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan dan Sub. Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Penanggulangan Bencana.
c. Terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan, dan alokasi sumber dana serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan penanggulangan bencana.
d. Terlaksananya SPM yang menjadi Tanggung jawab Pemerintah Daerah khususnya bidang kebencanaan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan susunan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Menggambarkan uraian pengukuran kinerja kegiatan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tujuan dan sasaran program, kegiatan dan Sub. Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah bertujuan untuk :

1. Peningkatan akuntabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Umpan balik peningkatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
3. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas akan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsive terhadap lingkungannya.

Proses penyusunan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) dilakukan melalui proses perhitungan pengukuran kinerja untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya, evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan penyebab kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan melalui capaian target kinerja.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C. 29

Adapun tabel rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra SKPD

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai denganRenja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)	
										I		II		III		IV									
1	*3*	4	5			6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
			K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Resiko Bencana	193,5		10.916.297.198	100	4.593.034.576	195	3.068.641.460		268.554.100		400.669.310		534.695.208		1.847.692.663	0	3.051.611.281	-	99,45	100,0	7.644.645.857	51,68	70,03
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah monitoring daerah rawan bencana	100		1.279.460.814	100	30.750.000	1 Dokumen	400.000.000	-	10.960.000		2.051.200		15.000.000	1	371.920.000	1	399.931.200	100,00	99,98	101,0	430.681.200	101,00	33,66
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	100		350.000.000	100	30.750.000	1 Dokumen	400.000.000	-	10.960.000		2.051.200		15.000.000	1	371.920.000	1	399.931.200	100,00	99,98	101,0	430.681.200	101,00	123,05

	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan darurat untuk menghadapi bencana secara mandiridan proaktif	100		2.262.221.000	30	709.141.870	15 Lokasi	758.172.000	3	41.230.550	3	52.210.000	3	76.950.000	6,00	586.659.452	15	757.050.002	100,00	99,85	45,0	1.466.191.872	45,00	64,81
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	100		350.000.000	0	-	1 Dokumen	400.000.000	-	-	-	-		4.520.000	1	395.229.452	1,00	399.749.452	100,00	99,94	1,0	399.749.452	1,00	114,21
	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah monitoring daerah rawan bencana	75	Lokasi	1.353.300.000	15	509.316.870	15 dokumen	261.952.000	3	37.450.550	3	51.360.000	4	67.260.000	5	105.880.000	15	261.950.550	100,00	100,00	30,0	771.267.420	40,00	56,99
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	jumlah peserta pelatihan pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat	322	Angota	558.921.000	70	199.825.000	70 Angota	96.220.000	-	3.780.000	-	850.000		5.170.000	70	85.550.000	70	95.350.000	100,00	99,10	140,0	295.175.000	43,48	52,81

	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Presentase Penanganan Bencana	100	%	6.435.161.606	99,29	3.353.642.648	100	%	1.569.809.460	25	184.643.550	25	270.890.000	23	362.800.000	23	738.115.724	96,22	1.556.449.274	96,22	99,15	195,5	4.910.091.922	195,51	76,30
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	presentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100	%	4.572.271.960	100 %	2.285.850.188	12	Dokumen	1.169.359.460	2	138.563.550	2	201.260.000	-	270.640.000	1	545.665.724	5	1.156.129.274	41,67	98,87	6,0	3.441.979.462	6,00	75,28
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	persentase (%) Jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan di evakuasi terhadap kejadian bencana	100	%	1.562.889.646	100	1.067.792.460	419	orang	400.450.000	25	46.080.000	25	69.630.000	25	92.160.000	344	192.450.000	419	400.320.000	100,00	99,97	519,0	1.468.112.460	519,00	93,94
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Prosentase sistem dasar penanggulangan bencana	100	Kecamatan	456.858.208	10	499.500.058	1	Dokumen	340.660.000	2	31.720.000	2	75.518.110	2	79.945.208	4	150.997.487	10	338.180.805	########	99,27	20,0	837.680.863	20,00	183,36
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah monitoring daerah pasca bencana	50	Kecamatan	456.858.208	10	499.500.058	1	Dokumen	340.660.000	2	31.720.000	2	75.518.110	2	79.945.208	4	150.997.487	10	338.180.805	########	99,27	20,0	837.680.863	40,00	183,36

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	80	%	30.673.646.546	98,88	9.748.729.053	70 %	5.990.739.202	6	512.292.844	19	1.640.983.289	24	1.418.391.036	20	1.866.604.888	68,84	5.438.272.057	98,34	90,78	167,7	15.187.001.110	209,65	49,51
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	25	Dokumen	324.180.587	100 %	103.802.889	50 cc	28.640.000		-	10	4.276.812		4.698.000	40	19.466.303	50	28.441.115	100,00	99,31	51,0	132.244.004	204,00	40,79
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja BPBD yang tersusun tepat waktu, Dokumen Renstra BPBD yang tersusun (Dokumen)	10	Dokumen	110.134.910	17,00	35.943.160	16 Dokumen	14.320.000	-	-	10	4.276.812		304.000	6	9.715.880	16	14.296.692	100,00	99,84	33,0	50.239.852	330,00	45,62
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen SPIP, Evaluasi Renja, Laporan LKJiP yang tersusun	15	Dokumen	214.045.677	17,00	67.859.729	17 Laporan	14.320.000	-	-	-	-		4.394.000	17	9.750.423	17	14.144.423	100,00	98,77	34,0	82.004.152	226,67	38,31

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	27.963.966.122	91,873	9.073.751.935	100	%	5.430.153.606	25	489.655.162	25	1.585.575.198	25	1.361.644.658	25	1.483.306.703	100,1	4.920.181.721	100,08	90,61	191,9	13.993.933.656	191,95	50,04
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	70	Dokumen	26.698.423.765	28	8.639.452.627	14	Bulan	5.244.339.126	3	460.291.612	3	1.549.625.198	3	1.305.944.658	5	1.419.222.463	14	4.735.083.931	100,00	90,29	42,0	13.374.536.558	60,00	50,09
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	pembayaran jasa administrasi keuangan	60	Dokumen	1.265.542.357	24	434.299.308	12	Laporan	185.814.480	3	29.363.550	3	35.950.000	3	55.700.000	3	64.084.240	12	185.097.790	100,00	99,61	36,0	619.397.098	60,00	48,94
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	1.094.512.025	96	250.054.899	100	%	318.089.000	13	11.423.550	21	17.911.109	4	11.478.000	62	261.782.498	99,61	302.595.157	99,61	95,13	195,6	552.650.056	195,61	50,49

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	peralatan kebersihan dan bahan pembersih (bulan) & kebutuhan ATK (bulan)	198	Jenis	290.931.180	24	97.627.665	12 Paket	62.200.000	3	4.600.000	3	7.950.000	3	10.803.000	2	23.651.240	11	47.004.240	91,67	75,57	35,0	144.631.905	17,68	49,71
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	kebutuhan bahan cetakan dan penggadaan (bulan)	15	Jenis	57.070.497	24	17.267.190	12 Paket	3.600.000							12	3.599.696	12	3.599.696	100,00	99,99	36,0	20.866.886	240,00	36,56
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan surat kabar/koran	2500	Exemplar	19.488.054	960	6.442.760	24 Dokumen	2.760.000			5	675.000	5	675.000	14	1.350.000	24	2.700.000	100,00	97,83	984,0	9.142.760	39,36	46,91
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	rapat-rapat koordinasi & konsultasi yg di laksanakan (bulan)	87	Kali	427.831.969	24	128.717.284	12 Laporan	249.529.000	3	6.823.550	3	9.286.109	-	-	6	233.181.562	12	249.291.221	100,00	99,90	36,0	378.008.505	41,38	88,35
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadministrasian umum Berjalan Baik	100	%	270.176.163	80	133.606.198	100 %	87.576.163	9	7.464.132	23	19.769.920	24	20.690.938	30	25.964.832	84	73.889.822	84,37	84,37	164,4	207.496.020	164,37	76,80
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai yang disediakan	785	lembar	5.100.000	120	766.000	50 Laporan	500.000			12	120.000	12	120.000	24	250.000	48	490.000	96,00	98,00	168,0	1.256.000	21,40	24,63

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediany a Telepon, Air dan Listrik	12	Bulan	265.076.163	24	132.840.198	12	Bulan	87.076.163	3	7.464.132	3	19.649.920	3	20.570.938	3	25.714.832	12	73.399.822	100,00	84,29	36,0	206.240.020	300,00	77,80
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD	100	%	991.711.649	100 %	187.513.132	100	%	126.280.433	3	3.750.000	11	13.450.250	16	19.879.440	60	76.084.552	89,61	113.164.242	89,61	89,61	90,6	300.677.374	90,61	30,32
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	kendaraan dinas operasional kantor yang terpelihara (unit)	55	Unit	730.334.719	11	309.497.592	11	Unit	108.844.000	2	3.750.000	3	13.450.250	3	19.879.440	3	71.613.552	11	108.693.242	100,00	99,86	22,0	418.190.834	40,00	57,26
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas operasional yg terbayarkan perijinannya (unit)	55	Unit	126.800.000	19	39.887.072	11	Unit	15.000.000							1	2.131.000	1	2.131.000	9,09	14,21	20,0	42.018.072	36,36	33,14
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan kantor yang terpelihara (unit)	99	Unit	58.252.419	43	19.509.100	21	Unit	2.436.433							21	2.340.000	21	2.340.000	100,00	96,04	64,0	21.849.100	64,65	37,51
Rata-rata capaian kinerja (%)							59,77			9.059.380.662						Jumlah Realisasi Program				8.489.883.338			87,24		FALSE	#REF!
Predikat kinerja							Rendah																			

2.1 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser dilakukan penilaian terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Dalam pengukuran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, penilaian disusun dengan melakukan pendekatan terhadap kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan sistem kinerja tersebut didasarkan pada input, output dan outcome, terhadap pelaksanaan kegiatan dalam mencapai visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Secara rinci capaian capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser disajikan pada tabel berikut :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Paser

No.	Indikator	SPM /Standar nasional	IKK	Target Capaian	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	PENANGGULANGAN BENCANA											
1.	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang di legalisasi	Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten/Kota	-	100 %	-	-	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-
2.	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota (perjenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada dikawasan tempat tinggalnya	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten Paser (Perjenis Bencana) Rawan Bencana	-	150 orang	25 orang	25 orang	50 orang	50 orang	-	-	-	150 orang
3.	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana yang dilegalisasi	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	-	100 %	1 dokumen	-	-	-	-	-	100 %	100 %

4.	Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	-	145 orang	40 orang	25 orang	50 orang	30 orang	-	-	-	25 orang
5.	Jumlah dokumen hasil pengendalian operasi dan penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	3 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	1 dokumen
6.	Jumlah peralatan penyelematan diri bagi individu warga negara, keluarga, maupun petugas	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	10 unit	-	10 unit	10 unit	10 unit	-	-	-	10 unit
7.	Jumlah dokumen rencana kontijensi yang dilegalisasi	Penyusunan Rencana Kontijensi	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	1 dokumen
8.	Jumlah aparatur dan warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	-	50 orang	-	50 orang	50 orang	50 orang	-		50 orang	50 orang
9.	SK Penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-		1 dokumen	1 dokumen
10.	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan di evakuasi per jenis	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	-	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	-	100 %	100%	30 orang

	kejadian bencana											
11.	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Penyediaan Logistik dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	-	10 orang	-	10 orang	10 orang	-	-	-	-	10 orang
12.	Jumlah laporan pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		-	-	-	1 laporan	1 laporan	-	-	-	-

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Sebagai perangkat daerah yang menangani kebencanaan maka dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser, harus memprogramkan kegiatan - kegiatan yang tidak hanya bersifat responsive (tanggap darurat) namun juga menitikberatkan pada preventif atau pencegahan (siaga bencana).

Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma penanggulangan kebencanaan yang diusung pemerintah saat ini yaitu penanganan bencana yang bersifat reaktif atau telah berubah menjadi pengelolaan bencana secara manajerial.

Beberapa isu - isu strategis yang terkait dengan penanggulangan bencana saat ini, antara lain :

1. Kebijakan penanggulangan bencana di daerah belum optimal;
2. Masih tingginya tingkat kerentanan bencana;
3. Masih lemahnya kapasitas masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana;
4. Masih minimnya informasi risiko bencana dan sistem informasi kebencanaan;
5. Belum efektifnya kesiapsiagaan penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana;
6. Terbatasnya alokasi pembiayaan anggaran di sektor kebencanaan.

Meskipun perencanaan dalam hal penanganan bencana telah dilaksanakan untuk meminimalkan dampak kerusakan yang terjadi pada lingkungan, serta melindungi masyarakat terhadap ancaman bencana, namun pada saat pelaksanaannya masih seringkali terkendala upaya penanganan yang kurang koordinatif.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap Rancangan RKPD pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan. Hasil Review terhadap rancangan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 terlihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.31

Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2025

Kabupaten Paser

No.	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Rancangan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan			
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
A.	**PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pelayanan kesekretariatan		**6.999.040.288**		Tingkat kepuasan pelayanan kesekretariatan		**7.312.472.896**
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah		**40.000.000**		Nilai SAKIP Perangkat Daerah		**75.000.000**

1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	16 dokumen	20.000.000	Kab. Paser	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	16 dokumen	40.000.000
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 laporan	20.000.000	Kab. Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 laporan	35.000.000
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Tingkat kepuasan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah**		**6.646.004.176**		Tingkat kepuasan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah		**6.664.722.896**
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	34 Orang/ 14 bulan	6.404.722.896	Kab. Paser	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	34 Orang/ 14 bulan	6.404.722.896

2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	12 laporan	241.281.280	Kab. Paser	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	12 laporan	260.000.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tingkat kepuasan administrasi umum perangkat daerah		**96.936.112**				**290.200.000**
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Paser	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	3.000.000	Kab. Paser	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	3.000.000
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	0	Kab. Paser	Jumlah paket peralatan dan perlegkapan kantor yang disediakan	11 paket	62.000.000

3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Bulan	18.036.112	Kab. Paser	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	60.000.000
4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	12.700.000	Kab. Paser	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	12.000.000
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Paser	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	500 Exemplar	3.200.000	Kab. Paser	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 dokumen	3.200.000
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	60.000.000	Kab. Paser	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	150.000.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pengadministrasian umum berjalan baik	**100%**	**87.550.000**				**97.550.000**

1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Paser	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	550.000	Kab. Paser	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	550.000
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	87.000.000	Kab. Paser	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	97.000.000
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan BMD	**100%**	**128.550.000**				**185.000.000**
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	18 unit	123.550.000	Kab. Paser	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dna dibayarkan pajak dan perizinannya	11 unit	175.000.000

2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	31 Unit	5.000.000	Kab. Paser	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	31 unit	10.000.000
B.	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**		- **Cakupan layanan penanggulangan bencana** - **Indeks ketahanan daerah** - **Indeks Ketahanan Daerah** - **Indeks Resiko Bencana**	**75** **100%**	2.565.472.608		**Sistem pencegahan dini yang berfungsi (SPP dan SOP)**	**100%**	**4.691.661.676**
	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				**10.000.000**		**Meningkatnya Informasi kepada masyarakat tentang bencana**	**Tercapainya informasi bencana kepada masyarakat**	**215.000.000**

1.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten Paser (Perjenis Bencana)	Kabupaten Paser	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota (Per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada dikawasan tempat tinggalnya	8.500 peserta/warga	10.000.000	Kabupaten Paser	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota (Per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada dikawasan tempat tinggalnya	8.500 orang	215.000.000
	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		**Meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan darurat untuk menghadapi bencana secara mandiri dan proaktif**	**70%**	**624.230.320**		**Meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan darurat untuk menghadapi bencana secara mandiri dan proaktif**	**Jumlah daerah yang rawan bencana 10 Kecamatan**	**814.630.320**
1.	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/kota	Kabupaten Paser	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana	15 kegiatan	459.630.320	Kabupaten Paser	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana	15 kegiatan	459.630.320

			prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani				prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani		
2.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Paser	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	59 unit	10.000.000	Kabupaten Paser	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	59 unit	10.000.000
3.	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah aparatur dan warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan	100 orang	30.000.000	Kab. Paser	Jumlah aparatur dan warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan	100 orang	30.000.000
4.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC)	Kab. Paser	Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya	105 Anggota	104.600.000	Kab. Paser	Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya	105 Anggota	105.000.000

5.	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Kabupaten Paser	Jumlah dokumen rencana kontijensi yang dilegalisasi	1 dokumen	0	Kab. Paser	Jumlah dokumen rencana kontijensi yang dilegalisasi	1 dokumen	0
6.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Paser	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	4 laporan	10.000.000	Kabupaten Paser	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	4 laporan	200.000.000
7.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Paser	Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	100 peserta	10.000.000	Kabupaten Paser	Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	100 peserta	10.000.000
	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase penanganan bencana	100%	**1.461.606.080**		Presentase warga negara yang mendapat penyelamatan dan evakuasi	100%	**2.548.249.488**

1.	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Paser	Jumlah dokumen SK penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	5 dokumen	1.023.270.320	Kabupaten Paser	Jumlah dokumen SK penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	5 dokumen	1.360.135.488
2.	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Paser	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	500 orang	433.335.760	Kabupaten Paser	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan di evakuasi per jenis kejadian bencana	500 orang	988.114.000
3.	Penyediaan Logistik dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Paser	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	500 orang	5.000.000	Kabupaten Paser	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	500 orang	200.000.000

4.	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kabupaten Paser	Jumlah laporan pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana kabupaten/kota	12 laporan	0	Kabupaten Paser	Jumlah laporan pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana kabupaten/kota	12 laporan	0
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		**Persentase sistem dasar penanggulangan bencana**	**100%**	**469.636.208**				**1.113.781.868**
1.	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/kota	Kabupaten Paser	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	1 Kegiatan	329.636.208	Kabupaten Paser	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	1 Kegiatan	913.781.868

2.	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	70.000.000	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	100.000.000
3.	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Kabupaten Paser	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen	70.000.000	Kabupaten Paser	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen	100.000.000
	JUMLAH				**9.564.512.896**	**JUMLAH**			**12.004.134.572**

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB. KEGIATAN MASYARAKAT

1. Usulan Program, Kegiatan Dan Sub. Kegiatan

   Berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

TABEL T-C.3.2

Usulan Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2025

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**				
	Pelatihan penyelamatan & Evakuasi	**Provinsi**	**Presentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB**	**Rp. 15.000.000**	
	Pelatihan Pusdalops	**Provinsi**	**Presentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB**	**Rp. 15.000.000**	
	Pelatihan Logistik	**Provinsi**	**Presentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana**	**Rp. 15.000.000**	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser dalam renstranya memfokuskan pada kegiatan penguatan, kapasitas para pihak dalam penanggulangan bencana serta perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana terpadu. Sasaran yang akan dicapai BPBD Kabupaten Paser antara lain :

1. Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana.
2. Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana.
3. Meningkatkan kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana.
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistik bencana.
5. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan bencana menjadi kewajiban pemerintah kabupaten/kota untuk mencapainya, namun tanpa bantuan pemerintah pusat terkait pendanaan, maka pemerintah kabupaten/kota akan kesulitan untuk memenuhinya. Kondisi inilah yang kemungkinan merupakan faktor penghambat pencapaian SPM yang menjadi tugas BPBD Kabupaten/Kota dalam pelaksanaannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang salah satunya mengatur tentang Pelayanan Dasar pada rsan pemerintah wajib yaitu urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang terdiri dari :

1. Pelayanan informasi rawan bencana;
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

Pelayanan kebencanaan tersebut diatas wajib diselenggarakan oleh pemerintah bagi masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana, yang telah ditentukan mengenai target/sasaran serta indikatornya.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang telah diikuti dengan diterbitkannya Permendagri nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub. Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kabupaten/Kota wajib untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terkena dampak di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 adalah:

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan masalah pembangunan daerah. BPBD Kabupaten paser tahun 2025 dalam rangka mendorong tercapainya visi dan misi pembangunan kabupaten paser terutama misi ketiga Mengurangi Ketimpangan Antar wilayah melalui peningkatan aksebilitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Sedangkan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur dan rasional. Sesuai dengan kaidah perumusan sasaran yang harus memenuhi kriteria specifik, measurabel,achievable, relevant, time bound dan continously improve (SMART-C) maka sasaran harus mempunyai indikator yang terukur sehingga pengerahan dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapainya dapat lebih efektif dan efisien.

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur penghubung antar wilayah, kualitas pemukiman dan kualitas pengelolaan lingkungan hidup.

Sasaran : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, peneta ruang dan penanggulangan bencana.

Indikatornya : Indeks Ketahanan Daerah

3.3 PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB. KEGIATAN

Program , kegiatan dan Sub. Kegiatan yang ada pada rancangan renja berikut ini akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025, sebanyak 2 (dua) Program, 9 (sembilan) kegiatan dan 28 (dua puluh dela) Sub. Kegiatan .

Rencana Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.33

Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2025

Kabupaten Paser

No.	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Rancangan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan			
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
A.	**PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pelayanan kesekretariatan		7,392,468,848		Tingkat kepuasan pelayanan kesekretariatan		**7,312,472,896**
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah		**110,000,000**		Nilai SAKIP Perangkat Daerah		**75,000,000**
1.	Penyusunan Dokumen	Tana	Jumlah dokumen	16 dokumen	55,000,000	Tana Paser	Jumlah dokumen	16 dokumen	40,000,000

		Perencanaan Perangkat Daerah	Paser	perencanaan perangkat daerah				perencanaan perangkat daerah		
	2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tana Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 laporan	55,000,000	Tana Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 laporan	35,000,000
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Tingkat kepuasan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah**		**6,692,493,856**		Tingkat kepuasan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah		**6,664,722,896**
	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tana Paser	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	34 Orang/ 14bulan	6,404,722,896	Tana Paser	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	34 Orang/ 14bulan	6,404,722,896
	2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tana Paser	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi	12 laporan	287,770,960	Tana Paser	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi	12 laporan	260,000,000

				penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD				penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD		
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tingkat kepuasan administrasi umum perangkat daerah		**138,936,000**				**290,200,000**
	1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tana Paser	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	3,000,000	Tana Paser	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	3,000,000
	2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tana Paser	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	0	Tana Paser	Jumlah paket peralatan dan perlegkapan kantor yang disediakan	11 paket	62,000,000

	3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tana Paser	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Bulan	30,036,000	Tana Paser	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	60,000,000
	4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tana Paser	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	12,700,000	Tana Paser	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	12,000,000
	5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tana Paser	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	500 Exemplar	3,200,000	Tana Paser	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 dokumen	3,200,000
	6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tana Paser	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	90,000,000	Tana Paser	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	150,000,000
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pengadministrasian umum berjalan baik	**100%**	**101,199,992**				**97,550,000**

	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tana Paser	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	1,199,992	Tana Paser	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	550,000
	2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tana Paser	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	100,000,000	Tana Paser	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	97,000,000
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan BMD	**100%**	**349,839,000**		Persentase Pemeliharaan BMD		**185,000,000**
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tana Paser	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	18 Unit	339,839,000	Tana Paser	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dna dibayarkan pajak dan perizinannya	11 unit	175,000,000

	2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tana Paser	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	31 Unit	10,000,000	Tana Paser	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	31 unit	10,000,000
	B.	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**		- **Cakupan layanan penanggulangan bencana**	**75**	4,006,601,048		- **Cakupan layanan penanggulangan bencana**	**100%**	**4,691,661,676**
				- **Indeks ketahanan daerah**	**100%**			- **Indeks ketahanan daerah**		
				- **Indeks Ketahanan Daerah**				- **Indeks Ketahanan Daerah**		
				- **Indeks Resiko Bencana**				- **Indeks Resiko Bencana**		

		Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				**270,000,000**		**Meningkatnya Informasi kepada masyarakat tentang bencana**	**Tercapainya informasi bencana kepada masyarakat**	**215,000,000**
	1.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten Paser (Perjenis Bencana)	Kabupaten Paser	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman	200 orang	270,000,000	Kabupaten Paser	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang	8.500 orang	215,000,000

				bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun		
		Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		**Meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan darurat untuk menghadapi bencana secara mandiri dan proaktif**	**70%**	**744,230,320**		**Meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan darurat untuk menghadapi bencana secara mandiri dan proaktif**	**Jumlah daerah yang rawan bencana 10 Kecamatan**	**814,630,320**
	1.	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/kota	Kabupaten Paser	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	15 kegiatan	459,630,320	Kabupaten Paser	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	15 kegiatan	459,630,320

	2.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Paser	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	59 unit	10,000,000	Kabupaten Paser	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	59 unit	10,000,000
	3.	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Tana Paser	Jumlah aparatur dan warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan	100 orang	150,000,000	Tana Paser	Jumlah aparatur dan warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan	100 orang	30,000,000
	4.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC)	Tana Paser	Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya	105 Anggota	104,600,000	Tana Paser	Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya	105 Anggota	105,000,000

	6.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Paser	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	4 laporan	10,000,000	Kabupaten Paser	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	4 laporan	200,000,000
	7.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Paser	Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	100 peserta	10,000,000	Kabupaten Paser	Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	100 peserta	10,000,000

		Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase penanganan bencana	100%	**2,172,734,520**		Presentase warga negara yang mendapat penyelamatan dan evakuasi	100%	**2,548,249,488**
	1.	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Paser	Jumlah dokumen SK penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	5 dokumen	1,142,766,520	Kabupaten Paser	Jumlah dokumen SK penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	5 dokumen	1,360,135,488

	2.	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Paser	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	500 orang	909,642,000	Kabupaten Paser	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan di evakuasi per jenis kejadian bencana	500 orang	988,114,000
	3.	Penyediaan Logistik dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Paser	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	500 orang	120,326,000	Kabupaten Paser	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	500 orang	200,000,000
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		**Persentase sistem dasar penanggulangan bencana**	**100%**	**819,636,208**				**1,113,781,868**

	1.	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/kota	Kabupaten Paser	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	1 Kegiatan	529,636,208	Kabupaten Paser	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	1 Kegiatan	913,781,868
	2.	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	70,000,000	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	100,000,000
	3.	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi	Kabupaten Paser	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana	2 Dokumen	220,000,000	Kabupaten Paser	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana	2 Dokumen	100,000,000

		Pascabencana (R3P) Kab/Kota		dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun		
		JUMLAH				**11,399,069,896**		**JUMLAH**		**12,004,134,572**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan, program prioritas dan adanya rekapitulasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025.

Hasil perumusan program, kegiatan dan Sub. Kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan sebagai berikut :

Rekapitulasi Program dan Kegiatan Berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2025

No.	Prioritas Daerah	Nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Rp.	Ket
1	2	3	4	5
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan Penanggulangan Bencana	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**4.006.601.048,00**	
1.		***Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota***	**270.000.000,00**	
		- Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	0	
		- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten Paser (Perjenis Bencana)	270.000.000,00	
2.		***Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana***	**744.230.320,00**	
		- Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	0	
		- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten Paser	10.000.000,00	

		- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten	10.000.000,00	
		- Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	10.000.000,00	
		- Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten /Kota	459.630.320,00	
		- Sub. Kegiata Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	104.600.000,00	
		- Penyusunan Rencana Kontijensi	0	
		- Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	150.000.000,00	
3.		***Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana***	**2.172.734.520,00**	
		- Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1.142.766.520,00	
		- Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	909.642.000,00	
		- Penyediaan Logistik dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	120.326.000,00	
		- Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	0	
4.		***Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana***	**819.636.208,00**	
		- Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/kota	529.636.208,00	
		- Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	70.000.000,00	
		- Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	220.000.000,00	
		Jumlah	**4.006.601.048,00**	

Prakiraan maju berdasarkan indikator kinerja dan pagu indikatif yang telah disusun, dalam rumusan rencana program/kegiatan dan Sub. Kegiatan maka diharapkan pada tahun berikutnya dengan program , kegiatan dan Sub. Kegiatan yang telah ditetapkan dapat meningkat seiring dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser dalam hal penanggulangan bencana.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) sangat penting dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan pemerintahan yang bersih sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya dapat dirasakan sampai kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser adalah Program Tahunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta sasaran program BPBD Kabupaten Paser. Dalam pelaksanaan program, Kegiatan, Sub Kegiatan Rencana Kerja (Renja) menjadi pedoman untuk peningkatan kinerja bagi seluruh jajaran BPBD dan untuk memulihkan dampak buruk masyarakat yang terkena bencana menjadi lebih baik di Kabupaten Paser dan pemenuhan SPM tentang kebencanaan.

Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf BPBD Kabupaten Paser agar menjadi lebih baik dimasa datang.

Demikian diharapkan rencana kinerja tahunan ini dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan program/kegiatan dan semoga dapat bermanfaat serta mendukung keberhasilan pembangunan Kabupaten Paser.

Tana Paser, 10 Juli 2024
Kepala Pelaksana
BPBD Kabupaten Paser

Ruslan, S.Sos, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19681025 199303 1 005

LAMPIRAN – LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan Jenderal Sudirman Telp/Fax. 0543-22469 Tana Paser 76211
E-mail: bpbdpaser@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PASER

NOMOR : 050/ 46 /BPBD/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA PELAKSANA,

Menimbang : a. bahwa menjamin terwujudnya konsistensi perencanaan pembangunan Tahun 2025 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025 Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah;

b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025;

c. Tim sebagaimana dimaksud di tetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser Kabupaten Paser.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;

KEDUA : Tim Penyusun Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA keputusan ini terikat oleh ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Penyusunan Renja PD

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada Tanggal : 24 Februari 2024

Kepala Pelaksana,

PEMERINTAH KABUPATEN PASER BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Rustam, S.Sos, MM
Pembina Tk.I (IV b
NIP. 19681025 199303 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

- Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nomor : 050/ 46 /BPBD/2024
Tanggal : 29 Februari 2024
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PASER
TAHUN 2025

Jabatan Dalam Tim		Nama / Jabatan
Pengarah	:	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser
Penanggungjawab	:	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Anggota	:	1. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan 2. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik 3. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi 4. Hermansyah 5. Marianti, A. Md 6. Yossy Yulianingsih, S.Sos 7. Nor Octavia Saputri

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH,

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Baslan, S.Sos, MM
Pembina Tk.I / IV b
NIP. 19681025 199303 1 005

Nomor : **050/** 46 **/BPBD/2024**
Tanggal : 24 **Februari 2024**
Tentang : **Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan**
Bencana Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025

RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA KERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PASER

TAHUN 2025

1. Pengarah, yaitu:

    a. Memberikan arahan, masukan dan saran berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser Tahun 202**5**, baik dalam hal persiapan, mekanisme penyelenggaraan, pelaksanaan penyusunan, hasil akhir dokumen maupun legalisasi Rencana Kerja (Renja) Tahun 202**5**;
    b. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi serta mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh tim kelompok kerja Renja Tahun 202**5**;
    c. Menyampaikan laporan kegiatan perkembangan penyusunan Renja melalui Sekretaris BPBD Kabupaten Paser.

1. Penanggungjawab, yaitu:
    a. Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan Tim Penyusun Renja BPBD Kabupaten Paser Tahun 202**5**;
    b. Membantu Penanggungjawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim dalam penyusunan Renja Tahun 202**5** BPBD;
    c. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim penyusun kepada Kepala BPBD Kabupaten Paser.

2. Ketua, yaitu:
    a. Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusuna Renja Tahun 202**5** BPBD Kabupaten Paser;
    b. Membantu penanggungjawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim penyusun Renja Tahun 202**5** BPBD;
    c. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim Penyusun kepada Penanggungjawab penyusunan Renja BPBD Kabupaten Paser

3. Anggota, yaitu:

   a. Mereviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah (PD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser;
   b. Melakukan analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser;
   c. Melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser;
   d. Melakukan telaahan terhadap rancangan awal RKPD;
   e. Merumuskan tujuan, sasaran dan program kegiatan;
   f. Merumuskan program prioritas;

g. Menyesuaikan dokumen rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH,

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Rusmadi, S.Sos, MM
Pembina Tk.I / IV b
NIP. 19681025 199303 1 005